

NEGERI NGAWI RAMAH
e-jurnal
WEDYADININGRAT
JURNAL KELITBANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NGAWI
(BAPPELITBANG)**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 746709, 744627, 743097, Fax. (0351) 745956
Email: bappelitbang@ngawikab.go.id
Website: <http://www.bappelitbang.ngawikab.go.id>

TAHUN 2020

SUSUNAN REDAKSI JURNAL KELITBANGAN

Pengarah :

INDAH KUSUMAWARDANI, S.Pt, M.Si
(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi)

Penanggung Jawab :

SARGIAN JANUARDY, SH. MM
(Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Ngawi)

Tim Pelaksana :

1. ARSITOWATI, Amd
(Kasubid Sosial dan Pemerintahan pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi)
2. ESTHI MINDRATI, SE, MSi
(Kasubid Inovasi dan Teknologi pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi)
3. VITA PURNAMASARI, SE, MM
(Kasubid Ekonomi dan Pembangunan pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi)

Mitra Kerja :

ALIP SATYA, ST

Pembuat Artikel :

1. DWIONO SLAMET RAHARJO, ST
(Staf Bidang Litbang Pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi);
2. TRI WAHYU HANDONO
(Staf Bidang Litbang Pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi);
3. LILIK, SH
(Staf Bidang Litbang Pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi).

Alamat Redaksi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi
Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 746709, 744627, 743097, Fax. (0351) 745956 Email:bappelitbang@ngawikab.go.id
Website: <http://www.bappelitbang.ngawikab.go.id>

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah Rabbil Alamiin. Segala puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Jurnal Kelitbangan Negeri Ngawi Ramah ini bisa diselesaikan sesuai rencana. Jurnal Kelitbangan Negeri Ngawi Ramah yang memuat hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Ngawi telah disusun. Jurnal Kelitbangan Negeri Ngawi Ramah ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan di segala bidang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dan para stakeholder dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024.

Jurnal Kelitbangan e-Jurnal WEDYADININGRAT Negeri Ngawi Ramah ini adalah volume perdana, volume 2, Nomor 1 dengan memuat beberapa kajian dari berbagai bidang, diantaranya Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi Dan Sosial, Bidang Sumber Daya Alam, Bidang Teknologi Informasi Dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berperan serta dalam publikasi Jurnal Kelitbangan ini. Khususnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi selaku pengarah yang telah berhasil mempercepat terbitnya Jurnal Kelitbangan Negeri Ngawi Ramah ini. Kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan demi penyempurnaan jurnal ini kedepan.

Ngawi, 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1.1	Kajian Layanan Infrastruktur di Kab. Ngawi oleh Bidang Litbang Bappelitbang	1
1.2	Kajian IPM oleh Bidang Litbang Bappelitbang	8
1.3	Kajian IPG oleh Bidang Litbang Bappelitbang	13
1.4	Kajian Analisis Pengembangan Kluster Pangan oleh Bidang Litbang Bappelitbang	21

1. Layanan Infrastruktur di Kab. Ngawi

PRELIMINARY

The economic development of a region aims to improve the welfare of the people and the economic growth of the region. The success indicator for economic development can be reflected by economic growth which will determine future development policies

The availability of infrastructure has an important role as one of the drivers of economic growth in order to accelerate the process of economic development

Development policies that prioritize growth over equity. Economic growth is supported by the availability of infrastructure. The difference in infrastructure is one of the causes of regional economic imbalance from one region to another. The existence of this imbalance in development in Ngawi Regency, it is important to analyze the availability of infrastructure for economic development in Ngawi Regency.

Economic growth

The evolution of the theory of economic growth begins with the linear growth theory proposed by Adam Smith, Karl Marx, and David Ricardo (Kuncoro 2010). Adam Smith considers the prosperity of the country to be derived from its ability to use natural and human resources to produce a better level of production by emphasizing the existence of individual specialization and the division of labor. Karl Marx saw that profit would only be created through the exploitation of labor. He concluded that the depreciation that comes periodically of capitalism and giving rise to socialism. Another economist, David introduced the concept of Diminishing return and marginal product which will be used in further economic growth theories (David, 2010).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Indikator hasil pembangunan ekonomi dapat dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi yang akan menentukan kebijakan pembangunan di waktu mendatang

Ketersediaan infrastruktur memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi guna mempercepat proses pembangunan ekonomi

Kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan daripada pemerataan. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Perbedaan infrastruktur merupakan salah satu penyebab adanya ketimpangan perekonomian daerah yang satu dengan daerah yang lain. Adanya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Ngawi ini, maka penting untuk menganalisis ketersediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Ngawi

Pertumbuhan Ekonomi

Evolusi teori pertumbuhan ekonomi dimulai dari teori pertumbuhan linier yang diungkap oleh Adam Smith, Karl Marx, dan David Ricardo (Kuncoro 2010). Adam Smith menganggap kemakmuran negara diperoleh dari kemampuannya untuk menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan tingkat produksi yang lebih baik dengan menekankan adanya spesialisasi individu dan pembagian kerja. Karl Marx melihat laba hanya akan tercipta melalui eksploitasi kerja. Dia menyimpulkan bahwa depresiasi yang datang secara periodik akan kapitalisme dan menimbulkan sosialisme. Ekonom lainnya, David memperkenalkan konsep Diminishing return dan marginal product yang akan digunakan pada teori-teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya (David, 2010).

PDRB is the amount of added value of goods and services produced by all business units that arise as a result of economic activity in a particular area. By knowing the growth of economic sectors contained in the percentage distribution of the contribution of certain economic sectors to total GRDP and the rate of economic growth, policies can be planned for all economic development priorities.

To calculate PDRB, there are three approaches that can be used, namely:

- a. Production approach, GRDP is the total value of the final goods and services produced by various production units in certain areas within a certain period of time (usually one year).
- b. Revenue approach, GRDP is the amount of remuneration received by production factors in an area within a certain period (usually one year).
- c. Expenditure Approach, GRDP is all components of final demand from household consumption expenditure, government consumption, investment changes, and net exports within a certain period (usually one year).

PDRB at Current Price (ADHB) is used to view shifts and economic structures. PDRB ADHB describes the added value of goods and services calculated using prices each year and shows the income of residents of an area. PDRB per capita ADHB shows the income per one population. DRB at constant price In certain areas, the ADHK per capita DRB is useful for determining the real per capita economic growth. This research used ADHK 2000 PDRB.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi suatu wilayah tertentu. Dengan diketahui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terdapat pada distribusi persentase sumbangan sector ekonomi tertentu terhadap PDRB total dan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan dapat direncanakan ke seluruh prioritas pembangunan ekonomi.

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- b. Pendekatan Pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- c. Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, perubahan investasi, dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk melihat pergeseran dan structure ekonomi. PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun dan menunjukkan pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB perkapita ADHB menunjukkan pendapatan per satu orang penduduk. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ketahun. PDRB ADHK menggambarkan perkembangan riil barang dan jasa yang dihasilkan kegiatan ekonomi di daerah tertentu. PDRB perkapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. Penelitian ini digunakan PDRB ADHK 2000.

Infrastructure

Infrastructure is a whole element that is useful for facilitating and integrating economic activities. In terms of economic development infrastructure, several economies also give their opinion on infrastructure. Hirschman (1958) defines infrastructure in supporting production activities in various sectors of activity. According to Macmillan Dictionary of Modern Economics (1996), infrastructure is an element of an economic structure that facilitates the flow of goods and services between buyers and sellers. Meanwhile, The Routledge Dictionary of economics (1995) provides a broader definition that infrastructure is the main service of an area that helps economic activities and community activities so that they can take place through the provision of transportation and other supporting infrastructure.

Keywords:

The target of increasing infrastructure services covers all sectors of development, which is reflected in the increasing quality of education, health, transportation, energy (electricity) and communication infrastructure services to the community to realize an economic improvement towards a prosperous society in Ngawi Regency.

Conclusion:

The Ngawi District Government has targeted improving infrastructure services as an important part of the Ngawi Regency Government Work Plan 2020 and the Ngawi Regency Medium Term Development Plan (RPJMD) 2016-2021

Infrastruktur

Infrastruktur adalah keseluruhan elemen yang berguna untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ekonomi. Dalam hubungan infrastruktur pembangunan ekonomi, beberapa ekonomi juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirschman (1958) mendefinisikan infrastruktur dalam mendukung kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan. Menurut Macmillan Dictionary of Modern Economics (1996), infrastruktur merupakan elemen struktur ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan *The Routledge Dictionary of economics* (1995) memberikan pengertian yang lebih luas bahwa infrastruktur merupakan pelayan utama dari suatu wilayah yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlingsung melalui penyediaan transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya.

Kata Kunci :

Target peningkatan Layanan Infrastruktur mencakup seluruh sektor pembangunan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, energi (listrik) dan komunikasi kepada masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Ngawi

Kesimpulan:

Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menargetkan peningkatan Layanan Infrastruktur sebagai bagian penting dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021

Infrastructure services in Ngawi Regency 2012-2018 can be summarized as follows:

1. Coverage of Education Infrastructure Services

The coverage of education infrastructure services is the ratio of the number of 12 year old compulsory students recorded at the primary, junior high and high school education levels or the equivalent of the total population aged 7-18 years. From the results of the analysis of education infrastructure services in Ngawi Regency in the 2012-2018 period, the ratio of the number of 12 year old compulsory students recorded at SD, SMP and SMU education or the equivalent increased from 84.4% to 91.5% or an average increase. -average of 1.0% per year.

2. Health Infrastructure Service Coverage

The coverage of health infrastructure services is the ratio of the number of health infrastructures such as hospitals, Puskesmas, Pustu, Clinics and Polindes to the total population in Ngawi Regency. From the analysis of health infrastructure services in Ngawi Regency in the period 2012-2018, the ratio of the number of health infrastructure increased from 168.0% to 179.0% or an average increase of 1.6% per year. The health infrastructure service referred to here is that when viewed from the number of infrastructure, the number of health infrastructure in Ngawi Regency is sufficient.

3. Road Infrastructure Service Coverage

Road infrastructure service coverage is the ratio of the total length of roads in a stable condition to the total length of roads. From the results of the analysis of road infrastructure services in Ngawi Regency in the 2012-2018 period, the ratio of roads with a steady condition continued to increase from 40.6% to 55.0% or there was an increase in the number of lengths of roads with an average steady condition of 2.1% per year. .

Layanan Infrastruktur di Kabupaten Ngawi Tahun 2012-2018 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cakupan Layanan Infrastruktur Pendidikan

Cakupan layanan infrastruktur pendidikan adalah ratio jumlah murid wajib belajar 12 tahun yang tercatat di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMU atau yang sederajat dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun. Dari hasil analisis layanan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2012-2018 ratio jumlah murid wajib belajar 12 tahun yang tercatat di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMU atau yang sederajat meningkat dari 84,4% menjadi 91,5% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,0% per tahun.

2. Cakupan Layanan Infrastruktur Kesehatan

Cakupan layanan infrastruktur kesehatan adalah ratio jumlah infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Klinik dan Polindes dengan total jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi. Dari hasil analisis layanan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2012-2018 ratio jumlah infrastruktur kesehatan meningkat dari 168,0% menjadi 179,0% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,6% per tahun. Layanan infrastruktur kesehatan yang dimaksudkan disini adalah apabila ditinjau dari jumlah infrastruktur maka jumlah infrastruktur kesehatan di Kabupaten Ngawi telah mencukupi.

3. Cakupan Layanan Infrastruktur Jalan

Cakupan layanan infrastruktur jalan adalah ratio jumlah panjang jalan dengan kondisi mantap dengan jumlah total panjang jalan. Dari hasil analisis layanan infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2012-2018 ratio jalan dengan kondisi mantap terus meningkat dari 40,6% menjadi 55,0% atau terjadi peningkatan jumlah panjang jalan dengan kondisi mantap rata-rata sebesar 2,1% per tahun.

4. Coverage of Drinking Water Infrastructure Services

The coverage of drinking water infrastructure services is the ratio of the number of houses that have access to safe drinking water to the total number of houses in Ngawi Regency. From the analysis of drinking water infrastructure services in Ngawi Regency in the period 2012-2018, the ratio of the number of houses that have access to safe drinking water increased from 52.5% to 81.6% or an average increase of 4.2% per year.

5. Sanitation Infrastructure Service Coverage

The coverage of sanitation infrastructure services is the ratio of the number of houses that have access to a family toilet to the total number of houses in Ngawi Regency. From the results of the analysis of sanitation infrastructure services in Ngawi Regency in the 2012-2018 period, the ratio of the number of houses that had access to family latrines increased from 72.7% to 92.9% or an average increase of 2.9% per year.

6. Electricity Infrastructure Service Coverage

The coverage of electricity infrastructure services is the ratio of the number of families that have access to PLN electricity to the total number of families. From the analysis of electricity infrastructure services in Ngawi Regency in the 2012-2018 period, the ratio of the number of families that had access to PLN electricity increased from 70.7% to 80.0% or an average increase of 1.3% per year.

7. Telecommunication Infrastructure Service Coverage

Telecommunication infrastructure service coverage is the ratio of the number of families that have telephony, internet cafe and speedy access from Telkom to the total number of families. From the results of the analysis of telecommunication infrastructure services in Ngawi Regency in the period 2012-2018, the ratio of the number of families that had access to telephones, internet cafes and speedy from Telkom increased from 4.8% to 8.2% or an average increase of 0.5% per year.

4. Cakupan Layanan Infrastruktur Air Minum

Cakupan layanan infrastruktur air minum adalah ratio jumlah rumah yang telah memiliki akses air minum aman dengan total jumlah rumah yang ada di Kabupaten Ngawi. Dari hasil analisis layanan infrastruktur air minum di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2012-2018 ratio jumlah rumah yang telah memiliki akses air minum aman meningkat dari 52,5% menjadi 81,6% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 4,2% per tahun.

5. Cakupan Layanan Infrastruktur Sanitasi

Cakupan layanan infrastruktur sanitasi adalah ratio jumlah rumah yang telah memiliki akses jamban keluarga dengan total jumlah rumah yang ada di Kabupaten Ngawi. Dari hasil analisis layanan infrastruktur sanitasi di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2012-2018 ratio jumlah rumah yang telah memiliki akses jamban keluarga meningkat dari 72,7% menjadi 92,9% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,9% per tahun.

6. Cakupan Layanan Infrastruktur Listrik

Cakupan layanan infrastruktur listrik adalah ratio jumlah keluarga yang telah memiliki akses listrik PLN dengan total jumlah keluarga. Dari hasil analisis layanan infrastruktur listrik di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2012-2018 ratio jumlah keluarga yang telah memiliki akses listrik PLN meningkat dari 70,7% menjadi 80,0% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,3% per tahun.

7. Cakupan Layanan Infrastruktur telekomunikasi

Cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi adalah ratio jumlah keluarga yang telah memiliki akses telepon, warnet dan speedy dari Telkom dengan total jumlah keluarga. Dari hasil analisis layanan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2012-2018 ratio jumlah keluarga yang telah memiliki akses telepon, warnet dan speedy dari Telkom meningkat dari 4,8% menjadi 8,2% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,5% per tahun.

To conclude the overall infrastructure service result can be calculated by means of the average infrastructure service. Meanwhile, the average infrastructure service in Ngawi Regency in the 2012-2018 period increased from 60.8% to 72.8% or an average increase of 1.7% per year.

From the seven infrastructure service indicators above, we can see that the infrastructure services that have been fulfilled are health infrastructure (> 100%), while infrastructure services that still need to be improved are education infrastructure services, roads, drinking water, sanitation, electricity and telecommunications.

Recommendation

Based on the results of the conclusions above and to sharpen the results of the analysis of infrastructure services, it is recommended to deepen the information regarding the following matters:

1. Education Infrastructure, needs further study of:
 - a. The physical condition of the building,
 - b. Complete educational infrastructure such as furniture, educational tools and others.
 - c. Total number of teachers
2. Health Infrastructure, it is necessary to study:
 - a. The physical condition of the building,
 - b. Complete health infrastructure such as medical equipment and other laboratories.
 - c. Number of medical personnel.
3. Road Infrastructure, requires further study of:
 - a. The amount of traffic traffic,
 - b. Heavy load of trucks and buses passing through the access road.
 - c. Completeness of traffic signs for the safety of road users.
4. Drinking Water Infrastructure, requires further study of:
 - a. Water quality,
 - b. Continuous water supply to customers,
 - c. The quantity of water received by the customer,

Untuk menyimpulkan hasil layanan infrastruktur keseluruhan dapat dihitung dengan cara layanan infrastruktur rata-rata. Adapun layanan infrastruktur rata-rata di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2012-2018 meningkat dari 60,8% menjadi 72,8% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,7% per tahun.

Dari tujuh indikator layanan infrastruktur diatas, dapat kita lihat layanan infrastruktur yang sudah terpenuhi adalah infrastruktur kesehatan ($\geq 100\%$), sedangkan layanan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan adalah layanan infrastruktur pendidikan, jalan, air minum, sanitasi, listrik dan telekomunikasi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dan untuk menajamkan hasil analisa layanan infrastruktur, maka direkomendasikan pendalaman informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Infrastruktur Pendidikan, perlu pendalaman mengenai:
 - a. Kondisi fisik bangunan,
 - b. Kelengkapan infrastruktur pendidikan seperti furniture, alat-alat pendidikan dan lain-lain.
 - c. Jumlah guru
2. Infrastruktur Kesehatan, perlu pendalaman mengenai:
 - a. Kondisi fisik bangunan,
 - b. Kelengkapan infrastruktur kesehatan seperti kelengkapan alat-alat medis dan laboratorium lain-lain.
 - c. Jumlah tenaga medis.
3. Infrastruktur Jalan, perlu pendalaman mengenai:
 - a. Jumlah traffic lalu lintas ,
 - b. Berat beban kendaraan truk dan bus yang melewati akses jalan.
 - c. Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan pengguna jalan.
4. Infrastruktur Air Minum, perlu pendalaman mengenai:
 - a. Kualitas mutu air,
 - b. Kontinuitas pengaliran air ke pelanggan,
 - c. Kuantitas air yang diterima oleh pelanggan,

5. Sanitation Infrastructure, needs to be deepened regarding:
 - a. Septic tank quality,
 - b. Regular desludging facilities or when the septic tank is full,
 - c. Availability of clean water facilities.
 6. Electricity Infrastructure, requires further study of:
 - a. Frequency of power outages
 - b. The availability of an extensive electricity network and makes it easier for potential customers to access,
 - c. Quick response to customer complaints,
 7. Telecommunication Infrastructure, it is necessary to study:
 - a. Progress in communication and information facilities for people who already have cellphones,
 - b. Telephone exchange capacity owned by Telkom.
 - c. The availability of a wide telephone network that makes it easy for potential customers to access
5. Infrastruktur Sanitasi, perlu pendalaman mengenai:
 - a. Kualitas mutu tangki septik,
 - b. Fasilitas penyedotan secara berkala atau apabila tangki septik penuh,
 - c. Ketersediaan sarana air bersih.
 6. Infrastruktur Listrik, perlu pendalaman mengenai:
 - a. Frekuensi pemadaman listrik yang terjadi,
 - b. Tersedianya jaringan listrik yang luas dan memudahkan calon pelanggan mengakses ,
 - c. Respon yang cepat terhadap pengaduan pelanggan,
 7. Infrastruktur Telekomunikasi, perlu pendalaman mengenai:
 - a. Kemajuan fasilitas komunikasi dan informasi masyarakat yang sudah memiliki HP,
 - b. Kapasitas sentral sambungan telepon yang dimiliki oleh Telkom.
 - c. Tersedianya jaringan telepon yang luas dan memudahkan calon pelanggan mengakses ,

2. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Ngawi

PRELIMINARY

Development is a process of planning social change, because it includes various dimensions to strive for progress in economic welfare, modernization, national development, environmental insight and even improvement in the quality of humans to improve the quality of life.

Human development places humans as the ultimate goal of development, not just as a tool. The concept of human development is more comprehensive, which includes all the options that humans have at every stage of development, as well as a long-term goal that places development as a means of improving human quality.

Human development is essentially a planned effort to increase the capacity of the population to be able to actively determine their future. If the development planners in Ngawi Regency already understand the concept of human development in depth, it is hoped that they will be able to see all the problems and development needs comprehensively, so that they can formulate policies appropriately.

In order to complete the indicators for measuring the success of national development, it is necessary to measure the aspects directly related to the welfare and quality of life of every Indonesian citizen. The measure that can show this is the Human Development Index (HDI) or so-called the Human Development Index (HDI). This index can describe the quality of life conditions of the population from a qualitative (non-economic) and quantitative (economic) perspective.

The method of measurement is based on the calculation of individual population variables, not accumulative or collective variables, for example, economic growth is measured by changes in total population output regardless of who the producer is. UNDP (United Nation Development Program) provides a measure of the success of human development

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya sebagai alat. Konsep pembangunan manusia lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia dalam setiap tahapan pembangunan, sekaligus merupakan tujuan jangka panjang yang menempatkan pembangunan sebagai sarana meningkatkan kualitas manusia.

Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas penduduk untuk dapat secara aktif menentukan masa depan mereka. Bila para perencana pembangunan di Kabupaten Ngawi sudah memahami konsep pembangunan manusia secara mendalam, maka diharapkan mereka mampu melihat seluruh permasalahan dan kebutuhan pembangunan secara komprehensif, sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan dengan tepat.

Dalam rangka melengkapi indikator pengukuran keberhasilan pembangunan nasional, maka perlu diukur dari aspek yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup setiap penduduk Indonesia. Ukuran yang dapat menunjukkan hal tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau biasa disebut Human Development Index (HDI). Indeks ini dapat menggambarkan kondisi kualitas hidup penduduk dari sisi kualitatif (non ekonomi) maupun kuantitatif (ekonomi).

Cara pengukurannya pun berdasarkan penghitungan variable individu penduduk, bukan variable akumulatif atau kolektif, misal pertumbuhan ekonomi diukur dari perubahan output total penduduk tanpa melihat siapa penghasilnya. UNDP (United Nation Development Programme) memberikan ukuran terhadap keberhasilan pembangunan manusia

namely the Human Development Index (Human Development Index). The Human Development Index or HDI for short is a composite index calculated as the average of the Life Expectancy Index, Education Index and Decent Living Standards Index.

Since regional autonomy, each region is expected to know the size of its own region's HDI both for planning purposes and for evaluation, especially in knowing the development and distribution of human development results.

The population development of Kabupaten Ngawi from period to period has had an impact on development from the human side. The total population of Ngawi Regency in 2018 was 830,090 people including a male population of 405,807 people and 424,283 women. With the increasing number of population, of course it needs to be followed by an increase in the welfare of the population, in the aspects of education, health and the ability to meet their daily needs. Therefore it is necessary to have a measure to see the indicators of the success of this aspect with the Human Development Index (HDI).

In addition, the results of Ngawi's current HDI need to be compared with previous years, and related to the magnitude in the macro economy such as economic growth. In order to reveal more clearly and in detail about the success of development in Ngawi Regency, it is necessary to have a study. This study will focus on discussing regional development problems as measured by human development.

So that development activities carried out in Ngawi Regency do not experience inequality and do not cause various gaps, then humans as the main subject are not only positioned as development targets but also as development actors. In the current era of regional autonomy, very strategic steps that need to be taken are

yakni dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak.

Sejak otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan untuk mengetahui ukuran IPM daerahnya sendiri baik untuk keperluan perencanaan maupun untuk evaluasi khususnya dalam mengetahui perkembangan dan sebaran hasil-hasil pembangunan bidang manusia.

Perkembangan penduduk Kabupaten Ngawi dari periode ke periode telah membawa dampak terhadap pembangunan dari sisi manusianya. Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi tahun 2018 sebanyak 830.090 jiwa meliputi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 405.807 jiwa dan perempuan 424.283 jiwa. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tentunya perlu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu perlu adanya ukuran untuk melihat indikator keberhasilan aspek tersebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di samping itu hasil IPM Ngawi yang sekarang ini perlu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan dihubungkan dengan besaran dalam ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka untuk mengungkap lebih jelas dan detail tentang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ngawi, maka perlu adanya kajian. Studi ini akan fokus untuk membahas masalah pembangunan daerah yang diukur dari pembangunan manusia.

Agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi tidak mengalami ketimpangan dan tidak menimbulkan berbagai kesenjangan, maka manusia sebagai subyek utama tidak hanya diposisikan sebagai sasaran pembangunan namun juga sebagai pelaku pembangunan. Pada era otonomi daerah saat ini, langkah yang sangat strategis yang perlu dilakukan adalah

pay attention to human resources as early as possible, because they are

heir to implement the development in the future.

In more detail, there are four reasons why it is necessary to compile a Human Development Index (HDI) in Ngawi Regency.

First, HDI will provide information about the objective conditions of human quality, so that a complete map of the quality of human resource problems can be obtained.

Second, the results of the HDI compilation can be used as a monitoring tool for developments, social changes and changes in the quality of the community in Ngawi Regency.

Third, based on the results of the human development situation analysis, priority problems that are ongoing and may arise in Ngawi District can be identified, so that anticipatory steps can be taken as early as possible. In addition, the competent party can focus attention on the specific problems that arise so that the handling is more focused.

Fourth, it is realized that the use of measurement tools for success or development performance commonly used, such as the rate of economic growth, Gross Regional Domestic Product (PDRB), Per-capita Income, which is too oriented towards indicators of macroeconomic progress and does not describe equity, has many weaknesses and does not reflect the real conditions of society. On the other hand, measuring instruments such as HDI are considered to be more successful in describing social development that touches the results of human development in all its social aspects. Furthermore, HDI is a composite indicator of very basic human development indicators, namely education, health and people's purchasing power.

memberikan perhatian pada sumber daya manusia sedini mungkin, karena mereka adalah

pewaris pelaksana pembangunan di masa yang akan datang.

Secara lebih rinci terdapat empat pertimbangan mengapa diperlukan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi.

Pertama, IPM akan memberikan informasi tentang kondisi obyektif kualitas manusia, sehingga dapat diperoleh peta permasalahan kualitas sumber daya manusia yang lengkap.

Kedua, hasil penyusunan IPM dapat digunakan sebagai alat monitoring terhadap perkembangan, perubahan sosial dan perubahan kualitas masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis situasi pembangunan manusia, dapat diidentifikasi prioritas masalah yang tengah berlangsung dan mungkin muncul di Kabupaten Ngawi, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan sedini mungkin. Di samping itu pihak yang berkompeten dapat memusatkan perhatian masalah khas yang muncul sehingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih terfokus.

Keempat, disadari bahwa penggunaan alat ukur keberhasilan atau kinerja pembangunan yang lazim dipakai seperti Laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Per-kapita, yang terlalu berorientasi pada indikator kemajuan ekonomi makro serta kurang menggambarkan pemerataan, ternyata memiliki banyak kelemahan dan kurang mencerminkan kondisi riil masyarakat. Sebaliknya, alat ukur seperti IPM ternyata dinilai lebih berhasil menggambarkan pembangunan sosial yang menyentuh hasil pembangunan manusia dengan segala aspek sosialnya. Selanjutnya IPM merupakan indikator komposit dari indikator pembangunan manusia yang sangat mendasar yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Keywords : Human Development Index (HDI) or so-called Human Development Index (HDI). This index can describe the quality of life conditions of the population from a qualitative (non-economic) and quantitative (economic) perspective.

Conclusion

1. The 2018 HDI of Ngawi Regency was 69.91, an increase of 0.92 percent from 2017 of 69.27
2. The indicator of life expectancy in Ngawi Regency in 2018 is 71.92 years, an increase of 0.25 percent from 2017 which is 71.74 years.
3. Indicators of Old School Expectations in Ngawi Regency in 2018 is 12.68 years, an increase of 0.08 percent from 2017, which is 12.67 years.
4. The average length of schooling in Ngawi Regency in 2018 was 6.88 years, an increase of 3.03 percent from 2017 which was 6.66 years.
5. Indicators of Community Purchasing Power in 2018 amounted to Rp. 11,187 million per capita per year, an increase of 2.64 percent from 2017, namely Rp. 10,899 million per capita per year

Recommendation

First, the District Government of Ngawi needs to realize the importance of social investment in development and then translate it into a real socio-cultural development program. Preventing children from dropping out of school, preventing children from becoming malnourished, preventing the poor from getting worse, and so on is basically more meaningful than developing an approach that is curative in nature - which in addition to being expensive in social costs, also causes opportunities to slow down community empowerment.

Second, efforts to improve the quality of human resources basically always involve 3 interrelated aspects, namely the field of health education and increasing the purchasing power of the community so it is necessary to develop solid cross-sector coordination between

Kata Kunci : Indek Pembangunan Manusia (IPM) atau biasa disebut *Human Development Index* (HDI). Indek ini dapat menggambarkan kondisi kualitas hidup penduduk dari sisi kualitatif (non ekonomi) maupun kuantitatif (ekonomi).

Kesimpulan

1. IPM Kabupaten Ngawi 2018 adalah sebesar 69,91, meningkat 0,92 persen dari tahun 2017 sebesar 69,27
2. Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2018 adalah 71,92 tahun meningkat 0,25 persen dari tahun 2017 yaitu 71,74 tahun.
3. Indikator Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun 2018 adalah 12,68 tahun meningkat 0,08 persen dari tahun 2017 yaitu 12,67 tahun.
4. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 adalah 6,88 tahun meningkat 3,03 persen dari tahun 2017 yaitu 6,66 tahun.
5. Indikator Daya Beli Masyarakat tahun 2018 adalah sebesar Rp.11,187 juta per kapita per tahun meningkat 2,64 persen dari tahun 2017 yaitu Rp. 10,899 juta per kapita per tahun

Rekomendasi

Pertama, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu menyadari arti penting investasi sosial dalam pembangunan dan kemudian menterjemahkannya dalam bentuk program pembangunan bidang sosial-budaya yang benar-benar nyata. Mencegah anak putus sekolah, mencegah agar anak kurang gizi, mencegah agar masyarakat miskin tidak makin terpuruk, dan sebagainya pada dasarnya adalah lebih bermakna daripada mengembangkan pendekatan yang sifatnya kuratif —yang selain ongkos sosialnya mahal, juga menyebabkan kesempatan untuk memberdayakan masyarakat menjadi lambat.

Kedua, upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pada dasarnya selalu menyangkut 3 aspek yang saling terkait yakni bidang pendidikan kesehatan dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat sehingga perlu dikembangkan koordinasi lintas sector yang mantap antar

offices / agencies / agencies / institutions dealing with health, education and community economic empowerment issues. This cross-sectoral coordination, in addition to the matter of determining target areas, intervention programs, division of labor, also focuses and agreement on target groups.

Third, by realizing that the gap in human quality, which if allowed to drag on will be prone to trigger social polarization and even conflict between classes, in the future what is actually needed is a social development policy that is more pro to the lower classes until a certain point is reached in balance. relatively evenly distributed. Providing scholarships to children from poor families, providing subsidized medical assistance to poor families, or providing business capital assistance to the poor are some examples of intervention programs that need to be developed to give poor people the opportunity to empower themselves.

Fourth, it is necessary to pay special attention to the quality of children in human resource development programs in Ngawi District, so that they do not become victims or victimized parties due to a lack of awareness of children's rights and the importance of social investment for children's future.

Dinas / badan / instansi / lembaga yang menangani persoalan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koodinasi lintas sektoral ini, selain menyangkut persoalan penentuan wilayah sasaran, program intervensi, pembagian kerja, juga fokus serta kesepakatan kelompok sasaran.

Ketiga, dengan menyadari bahwa kesenjangan kualitas manusia yang jika dibiarkan berlarut-larut akan rawan memicu timbulnya polarisasi sosial dan bahkan konflik antar kelas, maka ke depan yang dibutuhkan sebetulnya adalah kebijakan pembangunan bidang sosial yang lebih memihak kepada golongan bawah sampai pada suatu titik tertentu tercapai keseimbangan yang relatif merata. Pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin, pemberian bantuan pengobatan bersubsidi kepada keluarga miskin, atau pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin adalah sejumlah contoh program intervensi yang perlu dikembangkan untuk memberi kesempatan masyarakat miskin memberdayakan dirinya sendiri.

Keempat, perlu menaruh perhatian khusus pada kualitas anak dalam program pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Ngawi, agar mereka tidak menjadi korban atau pihak yang dikorbankan karena kurangnya kesadaran tentang hak anak dan arti penting investasi sosial bagi masa depan anak.

3. Kajian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ngawi

PRELIMINARY

National development is aimed at the entire population regardless of men or women. Although to date there have been many development progresses that have been made, the reality shows that gender disparities still exist in various fields of development. Development in the economic and social fields clearly implies an increase in the role and participation of women at various levels of economic, educational, political and cultural activities. The extent to which women's roles and their contribution to improving the economic quality of society are also influenced by the relationship between men and women in the division of labor in the household and in the employment field. In the long term, the increase in the status of women in society implies the need for a change in society's view of the household as a supporter of the economy and the functions of family institutions.

Women's empowerment is women's efforts to gain access and control over resources, economy, politics, socio-culture, so that women can organize themselves and increase self-confidence to be able to play a role and participate actively in solving problems, so as to build their abilities and self-concept. In this era of globalization, competition in the business world is very fierce, so we must carefully take advantage of the opportunities that exist to get maximum results. In this competition, it cannot be separated from existing resources. The business world must be supported by a qualified and professional workforce, which in this case is very much dominated by women workers. So that female workers are also required to continue to develop their potential.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Walaupun sampai saat ini telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang pembangunan. Pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial jelas mengisyaratkan peningkatan peran dan partisipasi wanita dalam berbagai tingkat kegiatan ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Sejauh mana peran wanita serta kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, dipengaruhi juga oleh hubungan antara pria dan wanita di dalam pembagian kerja dalam rumah tangga maupun dalam lapangan kerja. Dalam jangka panjang, peningkatan status wanita dalam masyarakat mengisyaratkan perlunya perubahan pandangan masyarakat tentang rumah tangga sebagai pendukung perekonomian dan fungsi-fungsi lembaga keluarga.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan di dunia usaha sangatlah ketat sehingga kita harus cermat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di dalam persaingan ini tidaklah lepas dari sumber daya yang ada. Dunia usaha harus didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan profesional, yang dalam hal ini sangat didominasi tenaga kerja perempuan. Sehingga tenaga kerja perempuan juga dituntut untuk terus mengembangkan potensi dirinya.

But there is a condition that requires women to play a more role than men, because in addition to playing a role in the household it also plays a role in improving the family economy. Thus, women in Ngawi Regency must prepare themselves to be productive in facing the existing competitive world economy.

The level of development success that accommodates gender issues can be measured, one of which is the IPG (Gender Development Index) and IDG (Gender Empowerment Index), which have been introduced by the United Nations Development Programs (UNDP) in the 1995 Human Development Report. IPG is a measure human development which is a composite of four indicators, which emphasizes gender status, especially in measuring basic abilities. It is hoped that this IPG figure will be able to provide a partial explanation of development programs that have accommodated gender equality and justice. The Gender Development Index has a function as an evaluation tool to determine the quality of human resources in an area, which in measuring the parameters are separated according to gender. Basically, the Gender Development Index is not much different from the Human Development Index (HDI), the variable used is the same, only in the Gender Development Index it is more detailed into gender, because the basic function of the Gender Development Index itself is to measure gender inequality in human development.

Keywords :

The Gender Development Index has a function as an evaluation tool to determine the quality of human resources in an area, which is separated according to gender in measuring the parameters.

Tetapi ada suatu kondisi yang menuntut perempuan untuk berperan lebih daripada laki-laki, karena selain berperan dalam rumah tangga juga berperan meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan demikian perempuan di Kabupaten Ngawi harus mempersiapkan dirinya untuk produktif dalam menghadapi persaingan dunia ekonomi yang ada.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), yang telah diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender, Indeks Pembangunan Gender mempunyai fungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kualitas sumberdaya manusia pada suatu daerah, yang dalam pengukuran parameternya dipisahkan menurut jenis kelamin. Pada dasarnya Indeks Pembangunan Gender tidak jauh berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) variabel yang digunakan pun sama, hanya dalam Indeks Pembangunan Gender lebih dirinci ke dalam jenis kelamin, karena fungsi dasar Indeks Pembangunan Gender itu sendiri adalah untuk mengukur ketimpangan gender pada pembangunan manusia.

Kata Kunci :

Indeks Pembangunan Gender mempunyai fungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kualitas sumberdaya manusia pada suatu daerah, yang dalam pengukuran parameternya dipisahkan menurut jenis kelamin

Conclusion

- a. The IPG of Ngawi Regency in 2018 is 91.72. This figure tends to be stagnant, because the GPA in 2017 was 91.70, 2016 was 92.16, 2015 was 92.01, and 2014 was 92.03.
- b. In 2018 the population of Ngawi Regency became 830,090 people or a population growth rate of 0.02% per year. The population structure according to age and sex in Ngawi Regency in 2017 and 2018 can be explained that there are more women than men. Thus the sex ratio is below 100. In 2017 the sex ratio was 95.683 and in 2018 the sex ratio was 95.645.
- c. In 2017 the IPG component in the education sector, namely the average length of schooling for boys for 7.25, increased compared to 2016, which was 7.04 years and for women there was no increase for 6.15, increasing from the previous 6.15 years in 2016. The average total length of schooling is 6.66 years.
- d. Likewise, the 2017 school year expectation for boys for 12.53 years increased from the previous 12.46 years and the female school year expectation for 12.98 years increased from the previous year which was 12.78 years. The total expected length of schooling in 2017 is 12.67 years, an increase from 2016 which is 12.65 years.
- e. The APS of the population aged 7-12 is equivalent to that of elementary school education, so that the figure provides an illustration of the proportion of the population aged 7-12 years who attend elementary school, as well as for those aged 13-15 (junior high school level) and so on. The APS for elementary school age has shown a figure of 100 percent, while the APS for junior high school age is 98.98 percent and the APS for SMA is 76.71 percent, where the APS for high school age for boys is 69.40 percent and for girls is 82.77 percent.

Kesimpulan

- a. IPG Kabupaten Ngawi tahun 2018 adalah angka 91,72. Angka tersebut cenderung stagnan, karena IPG tahun 2017 adalah 91,70, tahun 2016 yaitu sebesar 92,16, tahun 2015 sebesar 92,01, dan tahun 2014 sebesar 92,03.
- b. Pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Ngawi menjadi 830.090 jiwa atau laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,02% pertahun. Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Ngawi tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dijelaskan bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dengan demikian sex rasionya dibawah 100. Pada tahun 2017 sex rasionya 95,683 dan tahun 2018 sex rasionya 95,645.
- c. Pada tahun 2017 komponen IPG di bidang pendidikan yaitu rata rata lama sekolah untuk laki-laki selama 7,25 meningkat daripada tahun 2016 yaitu 7,04 tahun dan perempuan tidak terdapat peningkatan selama 6,15 meningkat dari sebelumnya yaitu selama 6,15 tahun pada tahun 2016. Rata rata lama sekolah total adalah sebesar 6,66 tahun.
- d. Demikian juga harapan lama sekolah tahun 2017 untuk laki-laki selama 12,53 tahun meningkat dari sebelumnya yaitu 12,46 tahun dan harapan lama sekolah perempuan selama 12,98 tahun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 12,78 tahun. Harapan lama sekolah total tahun 2017 adalah sebesar 12,67 tahun, meningkat dari tahun 2016 yaitu 12,65 tahun.
- e. APS penduduk usia 7-12 adalah setara dengan jenjang pendidikan SD, sehingga angkanya memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang duduk dibangku SD, demikian pula untuk usia 13-15 tahun (jenjang pendidikan SLTP) dan seterusnya. APS usia SD sudah menunjukkan angka 100 persen, sedangkan APS usia SMP 98,98 persen dan APS SMA sebesar 76,71 persen, dimana APS Usia SMA laki-laki sebesar 69,40 persen dan perempuan sebesar 82,77 persen.

- f. The Gross Enrollment Rate (GER) is the ratio between the total population currently studying at a certain level and the entire population according to a certain school age group multiplied by one hundred. The GER of age 7-12 years in Ngawi Regency 2018 is 104.06, with details of the APK for men 103.72 and the GER for women is 104.42. APK for 13-15 years of age is 97.98 with details of GER for men are 95.27 and APK for women is 100.96, APK for ages 16-18 is 93.47 with details of GER for men 92.95 and GER for women being 94, 00.
- g. Net Enrollment Rate (NER) is the ratio between the total population who is currently attending school and the entire population according to a certain school age group multiplied by one hundred. NER for ages 7-12 years is 95.04, with details for male at 95.59 and for female at 94.44. The NER of 13-15 years is 81.62, consisting of 78.91 for men and 84.62 for women. NER 16-18 years old is 69.33, with details of male 65.64 and female 73.12.
- h. The Illiteracy Rate (ABH) describes the proportion of the population who cannot read and write (Latin and other letters). Population 10 years and over who are illiterate is 11.93 percent, with details of male 7.53 percent and female 16.05 percent.
- i. In 2017, the life expectancy for men was 69.74 years, increasing from the previous 69.06 years, while the life expectancy for men was 73.62 years, increasing from 2016, which was 72.92 years. Life expectancy in 2017 is 71.74 years, increasing from 2016, which is 71.63 years.
- j. Based on the health profile of Ngawi Regency in 2018, the number of pregnant women in Ngawi Regency was 11,782, where K1 visits were 11,339 (96.2%) and K4 visits were 10,520 (89.3%)
- f. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang tertentu dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia sekolah tertentu dikalikan seratus. APK usia 7-12 tahun Kabupaten Ngawi 2018 sebesar 104,06, dengan rincian APK laki-laki 103,72 dan APK perempuan 104,42. APK Usia 13-15 tahun sebesar 97,98 dengan rincian APK laki-laki 95,27 dan APK Perempuan 100,96, APK Usia 16-18 tahun sebesar 93,47 dengan rincian APK laki-laki 92,95 dan APK perempuan 94,00.
- g. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia sekolah tertentu dikalikan seratus. APM Usia 7-12 tahun sebesar 95,04, dengan rincian laki-laki sebesar 95,59 dan perempuan sebesar 94,44. APM Usia 13-15 tahun sebesar 81,62 dengan rincian laki-laki sebesar 78,91 dan perempuan 84,62. APM Usia 16-18 tahun sebesar 69,33 dengan rincian laki-laki sebesar 65,64 dan perempuan 73,12.
- h. Angka Buta Huruf (ABH) menggambarkan proporsi penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). Penduduk 10 tahun keatas yang buta huruf sebesar 11,93 persen dengan rincian laki- laki 7,53 persen dan perempuan 16,05 persen.
- i. Pada tahun 2017, angka harapan hidup untuk laki-laki sebesar 69,74 tahun meningkat dari sebelumnya yaitu 69,06 tahun sedangkan angka harapan hidup perempuan adalah 73,62 tahun meningkat dari tahun 2016 yaitu 72,92 tahun. Angka Harapan Hidup tahun 2017 adalah 71,74 tahun meningkat dari tahun 2016 yaitu 71,63 tahun.
- j. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2018, jumlah ibu hamil di Kabupaten Ngawi sebanyak 11.782, dimana Kunjungan K1 sebanyak 11.339 (96,2%) dan Kunjungan K4 sebanyak 10.520 (89,3%)

- k. From the health profile of Ngawi District in 2018, the number of maternal deaths was 12 people, where 2 deaths occurred during pregnancy, 2 deaths during childbirth and 8 during the postpartum period. If it is made as an indicator, the maternal mortality rate is 56 per 100,000 live births.
 - l. Breast milk is the main and best source of food for babies. Therefore, exclusive breastfeeding is the baby's main need. In Ngawi Regency in 2018, 76.6% of babies were exclusively breastfed by their mothers, with details of 75.9% for boys and 77.3% for girls.
 - m. Based on the health profile of Ngawi Regency in 2018, the number of mothers giving birth in Ngawi Regency was 11,246, and those assisted by health workers were 10,380 (92.3%), 10,253 (91.2%) who received postnatal care, and those who received vitamin A as much as 8,686 (77.2%)
 - n. In 2017 the IPG component in the economic sector in terms of per capita expenditure was adjusted, namely for men, amounting to 15,196 thousand per capita per year, slightly increasing from the previous year, namely 14,959 thousand per capita per year and for per capita expenditures adjusted for women of 9,362 thousand per capita per year. slightly decreased compared to the previous year 9,564 thousand per capita per year.
 - o. The Open Unemployment Rate (TPT) in Ngawi Regency in 2018 reached 3.83 percent with male TPT 1.63 percent and female TPT 6.63 percent.
- k. Dari profil Kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2018, Jumlah Kematian Ibu Maternal 12 orang, dimana kematian terjadi pada masa hamil sebanyak 2 kematian, saat melahirkan 2 kematian dan pada masa nifas 8 kematian. Bila dibuat sebagai indikator angka kematian ibu sebesar 56 per 100.000 kelahiran hidup.
 - l. ASI merupakan sumber makanan utama dan terbaik bayi. Oleh karena pemberian ASI eksklusif menjadi kebutuhan bayi yang utama. Di Kabupaten Ngawi pada tahun 2018, sebanyak 76,6 % bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya dengan rincian bayi laki-laki sebesar 75,9 % dan bayi perempuan sebesar 77,3%.
 - m. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2018, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Ngawi sebanyak 11.246, dan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 10.380 (92,3 %), yang mendapatkan pelayanan nifas sebanyak 10.253 (91,2 %), dan yang mendapatkan vitamin A sebanyak 8.686 (77,2%)
 - n. Pada tahun 2017 komponen IPG di bidang ekonomi dari segi pengeluaran perkapita disesuaikan yaitu untuk laki-laki sebesar 15.196 ribu per kapita per tahun sedikit meningkat dari tahun sebelumn ya yaitu 14.959 ribu per kapita per tahun dan untuk pengeluaran perkapita disesuaikan untuk perempuan sebesar 9.362 ribu perkapita per tahun sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 9.564 ribu perkapita pertahun.
 - o. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ngawi pada tahun 2018 mencapai 3,83 persen dengan TPT laki-laki 1,63 persen dan TPT Perempuan 6,63 persen.

p. Another measure of the labor force that is often used is the labor force participation rate (TPAK), a figure that indicates the percentage of the workforce to the working age population. The Labor Force Participation Rate (TPAK) in 2018 was 75.41 percent, with male TPAK 87.23% and female TPAK 64.33%.

Suggestion

Efforts to increase the gender development index of Ngawi Regency are carried out through efforts to empower women. More specifically, the fields work through the fields of education, health and socio-economy.

First, handling in the field of education needs to be done immediately considering that the education aspect is an important indicator in efforts to increase human resources. Several strategic steps can be taken, among others;

- a. provide adequate educational facilities and infrastructure;
- b. Provide the widest possible opportunity for women to determine aspirations in the field of education including providing opportunities for vocational education to provide skills and gain insight in the future.
- c. The need for awareness at the individual, family or parent and community level about the importance of education for children, including about the prospects for education for children;
- d. provide understanding to parents to avoid discriminatory behavior in providing opportunities for their children, especially for women;
- e. provide assistance or scholarships to school-age children from economically disadvantaged families;

p. Ukuran angkatan kerja lainnya yang sering digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu angka yang menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018 sebesar 75,41 persen, dengan TPAK laki-laki 87,23 % dan TPAK Perempuan 64,33 %.

Saran

Upaya peningkatan indeks pembangunan gender Kabupaten Ngawi dilakukan melalui upaya pemberdayaan perempuan. Lebih spesifik bidang garapannya melalui bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.

Pertama, penanganan di bidang pendidikan perlu segera dilakukan mengingat aspek pendidikan merupakan indikator penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Beberapa langkah strategis dapat dilakukan antara lain;

- a. melakukan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk menentukan aspirasi dalam bidang pendidikan termasuk memberikan peluang bagi ditempuhnya pendidikan kejuruan yang memberikan bekal ketrampilan dan menambah wawasan kelak di kemudian hari.
- c. Perlunya kesadaran baik pada tingkat individu, keluarga atau orang tua dan masyarakat tentang arti penting pendidikan bagi anak-anak, termasuk di dalamnya tentang prospek pendidikan yang ditempuh anak-anak;
- d. memberikan pemahaman pada orang tua untuk menghindari perilaku diskriminatif dalam memberikan kesempatan pada anak-anaknya khususnya bagi kaum perempuan;
- e. memberikan bantuan atau beasiswa terhadap anak-panak usia sekolah dari kalangan keluarga kurang mampu secara ekonomi;

Second, the development of the health sector that needs attention, among others;

- a. the importance of paying attention to medical facilities and infrastructure, both health facilities as well as medical and paramedical personnel available in the regions;
- b. raise awareness for families, especially mothers about the importance of maternal and toddler health, especially with regard to nutritional problems by making arrangements for the composition of nutritious foods that are cheap, easy and affordable so that the whole family can consume it, especially pregnant women, toddlers and children and adolescents ;
- c. the need to raise awareness of the importance of immunization for toddlers and to properly and properly care for the womb and babies through counseling activities. This is important for pregnant women, breastfeeding mothers and mothers who give birth.
- d. increase awareness in the community about behavior and healthy living so that the degree of health increases. Several things need to be done such as; choosing quality and nutritious food at an affordable price, bringing sick family members immediately either to the polindes, puskesmas or hospital before the illness gets worse, diligently attending posyandu and carrying out immunizations, maintaining body hygiene and so on.
- e. It is necessary to make efforts to improve IEC (communication, information and education) related to family planning practices, reproductive health issues, and sex education for adolescents, in order to reduce the rate of young marriage, especially for young women.

Kedua, pengembangan sektor kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain;

- a. pentingnya memperhatikan sarana dan prasarana medis baik fasilitas kesehatan maupun tenaga medis dan paramedis yang tersedia di daerah- daerah;
- b. meningkatkan kesadaran bagi para keluarga khususnya para ibu tentang arti penting kesehatan ibu dan balita terutama berkaitan dengan masalah gizi dengan melakukan pengaturan terhadap komposisi makanan bergizi yang murah, mudah dan terjangkau sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh keluarga terutama ibu hamil, balita dan anak-anak serta remaja;
- c. perlunya meningkatkan kesadaran akan arti penting imunisasi bagi balita dan melakukan perawatan terhadap kandungan serta bayi secara baik dan benar melalui kegiatan penyuluhan. Hal ini penting bagi ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang melakukan persalinan.
- d. meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang perilaku dan hidup sehat agar derajat kesehatan mengalami peningkatan. Beberapa hal perlu dilakukan seperti; memilih makanan yang berkualitas dan bergizi dengan harga yang terjangkau, membawa anggota keluarga yang sakit dengan segera baik ke polindes, puskesmas atau rumah sakit sebelum sakit bertambah parah, rajin menghadiri posyandu dan melakukan imunisasi, menjaga kebersihan badan dan sebagainya.
- e. perlunya dilakukan upaya peningkatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) berkaitan dengan praktek keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, dan pendidikan seks bagi remaja, dalam rangka menekan angka kawin muda khususnya pada remaja wanita.

Third, in the socio-economic aspect, other things that need to be considered are

- a. the need for attention to adolescents, especially with regard to their life style.
- b. counseling and activating youth activities as well as forming youth groups with productive activities.
- c. organizing youth recitation groups, providing facilities to increase youth skills, or educating school dropouts with entrepreneurial skills and providing education related to drug use, alcoholism, the dangers of HIV / AIDS and so on.
- d. Increase productive economic activities that are managed by women or most of the workforce is women.

Ketiga, dalam aspek sosial ekonomi hal lain yang perlu diperhatikan adalah

- a. perlunya perhatian terhadap remaja khususnya berkaitan dengan life style mereka.
- b. penyuluhan dan mengaktifkan kegiatan karang taruna serta membentuk kelompok remaja dengan kegiatan yang produktif.
- c. mengadakan perkumpulan pengajian remaja, penyediaan failitas untuk menambah ketrampilan remaja, atau mendidik remaja putus sekolah dengan ketrampilan kewirausahaan dan memberikan penyuluhan berkaitan dengan penggunaan narkoba, akibat minuman keras, bahaya HIV/AIDS dan sebagainya.
- d. Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan atau sebagian besar tenaga kerjanya perempuan.

4. Kajian Analisis Pengembangan Kluster Pangan

PRELIMINARY

Food is not only a basic need but a basic right for every human being who must always be guaranteed by the State together with the community. According to FAO (2016) around 12.5% of the world's population suffers from food shortages. That number is equivalent to 852 million people, estimated to be spread in the Asia Pacific region as many as 563 million people, in the African region around 239 million people, in the Latin American region of 49 million and only about 16 million in developed countries. The term food security is a condition where food will be available at any time, all people can easily access the quantity, quality and type of nutrients that are suitable for life. Food security is very closely related to the utilization of limited natural resources. Therefore, with increasing population, the Neo Malthusian reiterates the threat of hunger that continues to emerge in human life.

This shortage / food insecurity is due to technological advances that are expected to be able to increase the amount of food production, one day it will definitely reach the maximum limit, the land will face a saturation point for continuous planting, the threat of plant disease pests at any time always bringing up new variants that are increasingly ferocious and immune to insecticides and pesticides. This condition is exacerbated by the increasingly damaged environment due to unhealthy lifestyles of people and global warming which causes the season can no longer be well predicted.

The concept of food security covers four important aspects that must be met, namely (1) availability (food availability); (2) accessibility (affordability); (3) security (security); and (4) sustainability. These four important aspects must go hand in hand with population growth. On the other hand, what needs to get important attention in food security is how the food is produced (how to produce)

PENDAHULUAN

Pangan bukan hanya merupakan kebutuhan dasar namun menjadi hak dasar bagi setiap manusia yang harus selalu dijamin oleh Negara bersama dengan masyarakat. Menurut FAO (2016) sekitar 12,5% penduduk dunia menderita rawan kekurangan pangan. Jumlah itu setara dengan 852 juta orang, yang diperkirakan tersebar di Asia Pasifik sebanyak 563 juta jiwa, di kawasan Afrika sekitar 239 juta jiwa, di wilayah Amerika latin sebesar 49 juta dan hanya sekitar 16 juta jiwa di Negara - negara maju. Kondisi kekurangan pangan ini memunculkan adanya istilah ketahanan pangan yaitu kondisi di mana bahan pangan akan tersedia setiap saat, semua orang bisa dengan mudah mengakses dengan jumlah, mutu dan jenis nutrisi yang memenuhi untuk hidup. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Oleh sebab itu dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka kaum Neo Malthusian kembali menegaskan adanya ancaman kelaparan terus muncul dalam kehidupan manusia.

Kondisi kekurangan/ rawan pangan ini disebabkan kemajuan teknologi yang diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah produksi pangan, suatu saat pasti akan mencapai batas maksimal, tanah akan menghadapi titik jenuh untuk ditanami terus menerus, ancaman hama penyakit tanaman setiap saat selalu memunculkan varian baru yang semakin ganas serta kebal terhadap insectisida dan pestisida. Kondisi ini diperparah oleh semakin rusaknya lingkungan karena pola hidup masyarakat yang tidak sehat serta global warming yang menyebabkan musim tidak lagi bisa diperkirakan dengan baik.

Konsep ketahanan pangan mencakup empat aspek penting yang harus dipenuhi yaitu (1) availiability (ketersediaan bahan pangan); (2) accessibility (keterjangkauan); (3) security (keamanan); dan (4) sustainability (keberlanjutan). Empat aspek penting tersebut harus berjalan seiring dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Pada sisi yang lain, yang perlu mendapat perhatian penting dalam ketahanan pangan adalah bagaimana bahan pangan tersebut diproduksi (how to produce)

and how the food is obtained (how to get).

Law No. 18 of 2013 concerning Food, states that food security is "the condition of the fulfillment of food for the state up to individuals, which is reflected in the availability of sufficient food, both in quantity and quality, safe, diverse, nutritious, equitable, and affordable and not contrary to the religion, beliefs and culture of the community, to be able to live healthy, active and productive sustainably".. The Food Law also explains and strengthens the achievement of food security by realizing food sovereignty with food self-sufficiency (food resilience) and food safety.

Some definitions of food in detail can be defined as follows:

- a. Food sovereignty is the right of the state and nation to independently determine the Food policy which guarantees the right to Food for the people and which gives the community the right to determine the Food system in accordance with the potential of local resources.
- b. Food independence is the ability of the state and nation to produce diverse foods from within the country that can guarantee the fulfillment of sufficient food needs up to the individual level by utilizing the potential of natural resources, human, social, economic, and local wisdom with dignity.
- c. Food Safety is a condition and effort needed to prevent food from possible biological, chemical and other contaminants that can disturb, harm and endanger human health and do not conflict with the religion, beliefs and culture of the community so that it is safe for consumption.

Law No. 18 of 2012 states that the implementation of food is carried out to meet basic human needs that provide benefits in a fair, equitable and sustainable manner.

dan bagaimana bahan pangan tersebut diperoleh (how to get).

Undang – undang No 18 Tahun 2013 tentang Pangan, menyatakan bahwa ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".. UU tentang Pangan tersebut juga menjelaskan dan menguatkan pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food sovereignty) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety).

Beberapa pengertian tentang pangan secara rinci bisa didefinisikan sebagai berikut :

- a. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- b. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
- c. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

UU No 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

That means that in order to meet the food consumption needs of the community to the level of individuals, the state has the freedom to determine its food policy independently, cannot be dictated by any party, and food businesses have the freedom to determine and carry out their business in accordance with resources it has. Fulfillment of food consumption must prioritize domestic production by utilizing optimal resources and local wisdom. To realize this, three main things that must be considered are

- (i) Availability of food based on optimal use of local resources,
- (ii) Food affordability from the physical and economic aspects of the whole community,
- (iii) Utilization of food or consumption of food and nutrition for a healthy, active and productive life.

Food security is not only the responsibility of the government, but also needs to involve all stakeholders both at the national and regional levels as mandated in the explanation of Law No. 18 of 2013 which states that in realizing Food Sovereignty, Food Independence, and Food Security, it is necessary that food institutions has authority in building coordination, integration, and synergy across sectors. The institution carries out governmental tasks in the field of Food, which is under and is responsible to the President.

In detail, food problems are divided into four major issues, including (1) Production and Post-Harvest; (2) Distribution; (3) Commerce; (4) consumption.

Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan

sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah

- (i) Ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,
- (ii) Keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat,
- (iii) Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga perlu melibatkan seluruh stakeholder baik di tingkat nasional maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan UU no 18 tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Secara rinci Permasalahan pangan terbagi dalam empat masalah besar meliputi (1) Produksi dan Pasca Panen; (2) Distribusi; (3) Tata niaga; (4) Konsumsi.

Indonesia is an agrarian country but until now it has not been able to meet the food needs of its people. Food security index in Indonesia is still below other Southeast Asian countries, even below Vietnam and the Philippines. In detail, the food security index of Indonesia and some countries in Southeast Asia are shown in the following table 1.1:

NO	STATE	RANKING FOOD INDEX	INDEX *)
1	Malaysia	63,9	33
2	China	62	38
3	Thailand	57,9	45
4	Vietnam	50,4	55
5	Philipina	47,1	63
6	Indonesia	46,8	64

*) Ranking of 109 countries

This low food security index triggers internal problems,

both because of growing food needs while on the other hand resilience which is unstable, malnourished, and a very large number of Indonesia's food imports, which implies that Indonesia is not yet in a "food resistant" condition. This is evident from table 1.1 which shows that from 1994 to 2015, Indonesia always imported rice, within a period of 21 years, only in 2008, 2009 and 2013 Indonesia did not procure rice abroad.

Indonesia merupakan negara agraris namun sampai saat ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Indeks ketahanan pangan di Indonesia masih di bawah negara – negara Asia Tenggara lainnya, bahkan masih di bawah negara Vietnam dan Filipina. Secara rinci Indeks ketahanan pangan Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1. Indeks Ketahanan Pangan di Asia Tenggara

NO	NEGARA	INDEKS KETAHANAN PANGAN	RANKING *)
1	Malaysia	63,9	33
2	China	62	38
3	Thailand	57,9	45
4	Vietnam	50,4	55
5	Philipina	47,1	63
6	Indonesia	46,8	64

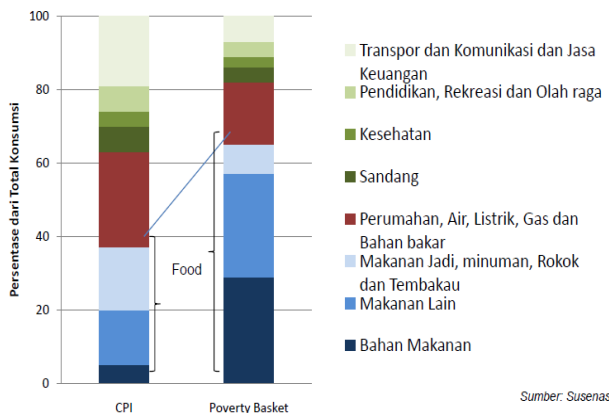
*) Rangking terhadap 109 negara

Indeks ketahanan pangan yang rendah ini memicu terjadi permasalahan-permasalahan internal,

baik karena kebutuhan pangan yang semakin besar sementara di sisi lain ketahanan pangan yang rendah akan menyebabkan banyak terjadinya kasus kelaparan, harga beras yang kurang stabil, gizi buruk, dan jumlah impor pangan Indonesia yang sangat besar yang mengisyaratkan bahwa Indonesia belum dalam kondisi "tahan pangan". Hal ini nampak dari tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2015 ini , Indonesia selalu melakukan import beras, dalam kurun waktu 21 tahun, hanya pada tahun 2008, 2009 dan 2013 Indonesia tidak melakukan pengadaan beras luar negeri.

On the other hand, Indonesia is the largest rice consumer in the world, the average rice consumption which reaches 113 kg per capita per year, making Indonesia very vulnerable to food security. This is exacerbated by a decrease in the number of arable land due to inappropriate land use change. Land, which should be a sustainable source of food, has been converted into industry and housing. Other aspects that cause vulnerability are due to food crops, especially rice, which are vulnerable to pests, crop failure due to bad weather, el nino and global warming.

Rice is the most important variable in household consumption of the poor or commonly referred to as Poverty Basket, because it is the highest percentage of expenditure. In general, food consists of food, other foods, processed foods, beverages, cigarettes and tobacco whose costs reach 69%. Rice itself as a food consumption costs reached 29%. The next household cost needs are housing, electricity, water, gas and fuel. The following needs are clothing, health, education, recreation and sports, transportation and communication and financial services, as shown in figure 1.1. the following :

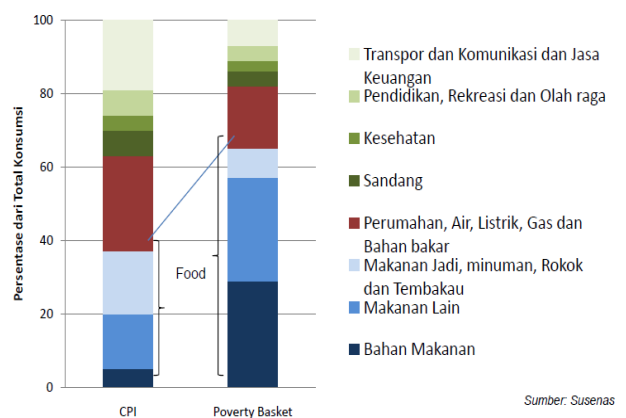


Sumber: Susenas

Figure 1.1. Poverty Basket

Di sisi lain Indonesia adalah konsumen beras terbesar di dunia, rata – rata konsumsi beras yang mencapai 113 kg per kapita per tahun, menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap ketahanan pangan. Hal ini diperparah oleh adanya penurunan jumlah lahan subur yang disebabkan alih guna lahan yang tidak pada tempatnya. Tanah yang seharusnya menjadi sumber pangan lestari banyak beralih fungsi menjadi industri dan perumahan. Aspek lain yang menyebabkan kerentanan adalah karena tanaman pangan, khususnya padi, merupakan tanaman yang rentan hama, kegagalan panen karena cuaca buruk, el nino dan pemanasan global.

Beras menjadi variabel paling penting dalam konsumsi rumah tangga masyarakat miskin atau biasa disebut sebagai Poverty Basket, karena merupakan persentase belanja paling besar. Secara umum, pangan terdiri atas bahan makanan, makanan yang lain, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang biayanya mencapai 69%. Beras sendiri sebagai bahan makanan biaya konsumsinya mencapai 29%. Kebutuhan biaya rumah tangga berikutnya adalah perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar. Kebutuhan berikutnya adalah sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, transport dan komunikasi dan jasa keuangan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. berikut ini :



Sumber: Susenas

Gambar 1.1. Poverty Basket

The graph above shows that for poor households, food needs have the highest percentage, even reaching more than 60 % of total expenditure, while food needs reach 30 %. This condition causes the percentage of expenditure used for other needs such as clothing, education, savings / investment, health, transportation and communication to be less. The shopping basket for poor households with a pattern like that will cause the quality of life of the household to be poor and will affect the next generation with low education, poor health and lack of savings or investment to improve their lives.

Food needs have meaning in national life which is very important because of the following things:

- a. As basic needs and human rights.
- b. Food availability in a country that is not sufficient for its needs can create economic instability.
- c. To realize food security requires a national commitment that is reflected in political commitments. The commitment is then manifested in the Raskin (Rice for the Poor) policy as an effort to improve the welfare of the entire Indonesian nation.

Besides being an important issue because it involves basic needs, rice expenditure also has a relatively large influence on domestic inflation fluctuations.

Rice is the main food ingredient, but actually there are other foods that can be used as food, namely corn, cassava, soybeans, green beans and several other types of plants. But so far the focus of food crops has only been on rice. The others are only alternative food or interrupted food which is not the main consumption.

Grafik di atas menunjukkan bahwa bagi rumah tangga miskin maka kebutuhan pangan memiliki persentasi yang paling tinggi bahkan mencapai lebih dari 60% dari total pengeluaran, sementara kebutuhan bahan makanan mencapai 30%. Kondisi ini menyebabkan persentase pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan lain seperti sandang, pendidikan, tabungan/investasi, kesehatan, transportasi dan komunikasi menjadi lebih sedikit. Keranjang belanja bagi rumah tangga miskin yang berpola seperti itu akan menyebabkan kualitas kehidupan rumah tangga tersebut menjadi kurang baik dan akan berimbas pada generasi berikutnya yang berpendidikan rendah, tingkat kesehatan kurang bagus serta tidak memiliki tabungan atau investasi untuk meningkatkan kehidupannya.

Kebutuhan pangan mempunyai arti dalam kehidupan bernegara yang sangat penting karena beberapa hal berikut ini :

- a. Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.
- b. Ketersediaan pangan di suatu Negara yang tidak mencukupi kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.
- c. Untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan komitmen nasional yang dicerminkan dari komitmen politik. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Selain merupakan permasalahan penting karena menyangkut basic need, pengeluaran kebutuhan beras juga memberikan pengaruh yang relatif besar terhadap fluktuasi inflasi yang ada di dalam negeri.

Padi merupakan bahan pangan utama, namun sebenarnya terdapat bahan pangan yang lain yang bisa digunakan sebagai bahan pangan yaitu jagung, ketela, kedelai, kacang hijau dan beberapa jenis tanaman yang lain. Namun selama ini fokus tanaman pangan hanya pada tanaman padi. Yang lainnya hanya sebagai bahan pangan alternatif atau bahan pangan sela yang bukan merupakan konsumsi utama.

Food is the main product of the agriculture sector, so one of the benchmarks is how much the agricultural sector contributes to an area, Ngawi Regency is a food granary in East Java Province and most of its life is largely supported by the agricultural sector. GRDP in Ngawi district shows that over the past five years more than 31% of total GRDP has been contributed from the agricultural sector.

CONCLUSION

Based on the objectives and results of the discussion above it can be concluded that

1. The condition of food crop agriculture in Ngawi district shows that rice is still the main commodity followed by cassava and sweet potatoes. The productivity of rice, maize and cassava respectively is quite high although from year to year it has decreased but is relatively low
2. Problems faced by the agricultural sector, especially food crops in Ngawi Regency, consist of (1) Production and Post-harvest (2) Distribution; (3) Trading System; (4) consumption. Each is down to more specific problems.
3. Problems faced in forming food crop clusters in Ngawi Regency are (1) Production Aspect; (2) Post-harvest management aspects; (3) Institutional Aspects and (4) Aspects of Commerce.
4. Stakeholders in the development of food crop sector clusters in Ngawi Regency consist of (1) farmers at both group and group level, (2) traders at the village level, sub-district level up to the regional level, (3) cooperatives, (4) Perhutani, (5) local government. At a broader level of stakeholders, the involvement of academics, government, business actors, especially the private sector also has an equally important role.

Bahan pangan merupakan hasil utama dari sektor pertanian, sehingga salah satu tolok ukurnya adalah seberapa besar kontribusi sektor pertanian terhadap suatu daerah, Kabupaten Ngawi merupakan lumbung pangan di Propinsi Jawa Timur dan sebagian besar kehidupannya banyak ditopang dari sektor pertanian. PDRB di kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir lebih dari 31% total PDRB disumbang dari sektor pertanian.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa

1. Kondisi pertanian tanaman pangan di kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa tanaman padi masih merupakan komoditas utama disusul oleh ketela pohon dan ubi jalar. Produktifitas tanaman padi, jagung dan ketela pohon masing cukup tinggi meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun relatif rendah
2. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor petanian khususnya tanaman pangan di kabupaten Ngawi terdiri atas (1) Produksi dan Pasca panen (2) Distribusi; (3) Tata Niaga; (4) Konsumsi. Masing-masing diturunkan ke dalam permasalahan yang lebih spesifik.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam membentuk kluster tanaman pangan di kabupaten Ngawi adalah (1) Aspek Produksi; (2) Aspek pengelolaan pasca panen; (3) Aspek Kelembagaan dan (4) Aspek tata niaga.
4. Stakeholder dalam pengembangan kluster sektor tanaman pangan di kabupaten Ngawi terdiri atas (1) petani baik pada tingkatan kelompok maupun gabungan kelompok, (2) pedagang baik pada level desa, level kecamatan sampai dengan level daerah, (3) koperasi, (4) perhutani, (5) pemerintah daerah. Dalam tingkatan stakeholder yang lebih luas maka pelibatan akademisi, pemerintah, pelaku usaha khususnya swasta juga memiliki peran yang tidak kalah penting.

RECOMMENDATION

The recommendations made in the formation of this cluster are as follows :

- a. Cluster development must pay attention to problems faced by farmer groups or farmer group combinations, traders both at the village level district or large traders so that it will provide convenience in solving problems in accordance with what is faced
- b. Another problem faced by the development of food crop clusters is continuity in the supply of food crop products. This continuity is related to markets that have been open to all marketing lines.
- c. Cluster formation must be based on the interests of who does what to attract attention.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang disampaikan dalam pembentukan kluster ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kluster harus memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani maupun gabungan kelompok tani, pedagang baik pada level desa kecamatan atau pedagang besar sehingga akan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan yang dihadapi
- b. Masalah lain yang dihadapi oleh pengembangan kluster tanaman pangan adalah kontinuitas dalam penyediaan produk hasil tanaman pangan. Kontinuitas ini berhubungan dengan pasar yang telah terbuka pada semua lini pemasaran.
- c. Pembentukan kluster harus didasari pada kepentingan siapa melakukan apa sehingga menarik perhatian.

